

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah pengadaan barang/jasa dengan metode pengadaan langsung di Kanwil DJP Jakarta Pusat pada tahun 2019 belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena implementasi prinsip dan etika pengadaan barang/jasa sangat bergantung pada pribadi masing-masing pelaku pengadaan sehingga tidak mempengaruhi kesesuaian pada alur dan tahapan pengadaan barang/jasa. Adapun rincian dari kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam alur proses pengadaan barang/jasa melalui penyedia dengan metode pengadaan langsung di Kanwil DJP Jakarta Pusat tahun 2019 belum sesuai dengan alur yang ada dalam aturan pengadaan barang/jasa karena terdapat kesalahan pada saat pengajuan permintaan pengadaan barang/jasa yang disebabkan oleh ketidaktahuan dari pengguna (*user*).
2. Tahapan pengadaan barang/jasa dengan metode pengadaan langsung pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat belum sesuai dengan tahapan yang ada dalam aturan pengadaan barang/jasa karena masih terdapat kekurangan dalam dokumentasi pada setiap

tahapan khususnya pada tahapan persiapan pengadaan, seperti Berita Acara Penetapan Spesifikasi Teknis, Berita Acara Penetapan HPS, dan Berita Acara Penetapan Rancangan Kontrak.

3. Pengadaan barang/jasa dengan metode pengadaan langsung pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat tahun 2019 telah memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa, dengan melakukan berbagai tindakan yang mengutamakan prinsip-prinsip pengadaan dalam pengadaan barang/jasa seperti mengutamakan kualitas barang/jasa dengan harga yang sesuai, terbuka dan tidak memihak kepada pihak tertentu, serta dapat dipertanggungjawabkan.
4. Pengadaan barang/jasa dengan metode pengadaan langsung pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat tahun 2019 telah mematuhi etika pengadaan barang/jasa, dengan mengimplementasikan etika pengadaan barang/jasa melalui pendekatan secara pribadi yang dilakukan oleh PPK terhadap para pelaku pengadaan agar tidak melakukan hal-hal yang dapat menjurus kepada tindak pidana korupsi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kanwil DJP Jakarta Pusat perlu melakukan sosialisasi/*In House Training*/pemberitahuan kepada seluruh pegawai yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa

sesuai dengan aturan terbaru, sehingga pengguna (*user*) atau para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa dapat mengetahui bagaimana alur proses pengadaan barang/jasa yang benar serta tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

2. Sebaiknya para pelaku pengadaan, khususnya PPK, diberikan pendidikan dan pelatihan (diklat) pengadaan barang/jasa atau diklat penyegaran secara berkala, mengingat bahwa PPK merupakan pihak yang bertanggung jawab atas tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, dan sebagian besar pelaku pengadaan sudah sangat lama tidak mengikuti diklat sementara aturan terkait pengadaan barang/jasa terus berubah.
3. Sebaiknya perlu dibuatkan wadah atau tempat khusus bagi PPK untuk menyimpan dokumen pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa, sehingga apabila ada mutasi pegawai baik itu PPK, Pejabat Pengadaan, atau Bendahara, pegawai yang menggantikan akan dapat dengan mudah mencari dokumen tersebut apabila suatu hari diperlukan.
4. Agar prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa dapat diimplementasikan dengan baik, selain diperlukan pelatihan dan penyegaran terkait aturan pengadaan barang/jasa bagi pelaku pengadaan, dapat juga dilakukan kegiatan *Emotional Spiritual Quotient (ESQ) Training* yang menekankan pada penguatan integritas dalam melakukan pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Ananda, Rusydi. dan Tien Rafida. 2017. *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan*. Medan: Perdana Publishing.
- Arsana, I Putu Jati. 2016. *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hardani, et. al. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat. 2019. *Buku Profil Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat Tahun 2019*. Jakarta: Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat.
- Kotler, Philip. dan Gary Armstrong. 2008. *Prinsip-prinsip Pemasaran, Edisi 12, Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Kusumastuti, Adhi. dan Ahmad Mustamil Khoiron. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mursid. 1993. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Alfabeta.
- Rahayu, Iin Tri. dan Tristiadi Ardi Ardani. 2004. *Observasi & Wawancara*. Malang: Bayumedia.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tayibnapi, Farida Yusuf. 2008. *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tjiptono, Fandy. 1999. *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Andi.

Yin, Robert K. 2013. *Studi Kasus : Desain & Metode*. Jakarta: Rajawali Pers.

Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

B. Artikel/Jurnal

Hamkah dan Hadi Purwanto. 2018. Jurnal Simetrik. *Kajian Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Volume 8, No.2*. Ambon: Politeknik Negeri Ambon.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2011. *Jurnal Pengadaan "Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"*. Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2018. *Jurnal Pengadaan*. Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Yukins, Christopher R. and Schooner, Steven L. 2007. Journal of International Law. *Incrementalism: Eroding the Impediments to a Global Public Procurement Market*, 38, 529.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.01/2018 tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung di Kementerian Keuangan.

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pengadaan.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

D. Situs Internet

<https://www.pajak.go.id/id/struktur-organisasi> (diakses tanggal 26 Mei 2021)

<https://www.pajak.go.id/id/tugas-dan-fungsi-0> (diakses tanggal 26 Mei 2021)

Indonesia Corruption Watch. (2020, 18 Februari). Tren Penindakan Kasus Korupsi 2019. Diperoleh dari <https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-2019> (diakses tanggal 25 April 2021)

Keterangan Pers Peran Penting Pengadaan Barang/Jasa Sebagai Bagian Dari Pengelolaan Keuangan Negara. (2018, 28 Juni). Diperoleh dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/keterangan-pers-peran-penting-pengadaan-barangjasa-sebagai-bagian-dari-pengelolaan-keuangan-negara/> (diakses tanggal 6 Maret 2021)

Kho, Budi. (2019, 10 Februari). Perbedaan Barang dan Jasa (Goods and Services). Diperoleh dari <https://ilmumanajemenindustri.com/pengertian-perbedaan-barang-dan-jasa-goods-and-services/> (diakses tanggal 6 Maret 2021)

KPK: Pengadaan Barang dan Jasa Mendominasi Kasus pada 2019. (2019, 8 Desember). Diperoleh dari <https://nasional.tempo.co/read/1281500/kpk-pengadaan-barang-dan-jasa-mendominasi-kasus-pada-2019> (diakses tanggal 25 April 2021)

Kusuma, Hendra. (2018, 28 Juni). Sri Mulyani Cerita Pentingnya Pengadaan Barang dan Jasa Bagi APBN. Diperoleh dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4087734/sri-mulyani-cerita-pentingnya-pengadaan-barang-dan-jasa-bagi-apbn> (diakses tanggal 6 Maret 2021)

Laporan Tahunan KPK 2019. (2020, 23 Juni). Diperoleh dari <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan> (diakses tanggal 25 April 2021)

Laporan Akhir Tahun ICW 2019. (2020, 8 Juni). Diperoleh dari <https://antikorupsi.org/id/laporan-akhir-tahun> (diakses tanggal 25 April 2021)

LKPP: Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Peringkat 2 di KPK. Diperoleh dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/06/11253441/lkpp-korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa-peringkat-2-di-kpk>. (diakses tanggal 25 April 2021)

Lubis, Abu Saman. (2014, 7 Agustus). Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Apakah Harus Dipedomani?. Diperoleh dari <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/artikel/balai-diklat-keuangan-malang-artikel-prinsipprinsip-pengadaan-barangjasa-apakah-harus-dipedomani-2019-11-05-0ba5c22f/> (diakses tanggal 26 Mei 2021)

Marbel. (2020, 1 April). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data (Bungin), Faktor Pengujian Keabsahan Data, Teknik Member Check, Tujuan Member Check. Diperoleh dari <https://duniakumu.com/teknik-pemeriksaan-keabsahan-data-bungin-faktor-pengujian-keabsahan-data-teknik-member-check-tujuan-member-check/> (diakses tanggal 30 Juli 2021)

Mengupas Tujuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Diperoleh dari <https://www.sekolahpengadaan.id/pengadaan-barang-dan-jasa/> (diakses tanggal 6 Maret 2021)

Niamas, Maila. (2021, 16 April). Barang dan Jasa : Pengertian, Perbedaan dan Contoh. Diperoleh dari <https://www.akuntansilengkap.com/ekonomi/pengertian-perbedaan-barang-dan-jasa-menurut-para-ahli-ilmu-ekonomi/> (diakses tanggal 6 Maret 2021)

Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Langsung. (2017, 4 Januari). Diperoleh dari <https://www.pengadaan.web.id/2017/01/tata-cara-pelaksanaan-pengadaan-langsung.html> (diakses tanggal 6 Maret 2021)

Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi. (2021, 31 Maret). Diperoleh dari <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-instansi> (diakses tanggal 25 April 2021)

Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara. (2021, 31 Maret). Diperoleh dari <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara> (diakses tanggal 25 April 2021)

E. Sumber Lain

- Gunawan, Ikhsan. 2010. *Motivasi Guru Tidak Tetap di Berbagai SMA Swasta di Kota Semarang*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Semarang: Program Sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.
- Maulana, Irvan. 2016. *Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Di Unit Layanan Pengadaan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Jakarta: Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara.
- Rifai, Achmad Hafiz. 2018. *Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Serang: Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Widyatama, Buyung. 2020. *Efektivitas Inventarisasi Barang Milik Negara pada Biro Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Jakarta: Program Studi Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara.